

THE CONCEPT OF ISLAMIC ECONOMICS FROM THE PERSPECTIVE OF MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO (ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE FUTURE OF ISLAMIC ECONOMICS)

Hasmita¹, Syaifullah*²

1

^{1,2}Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

E-mail: 'Hasmita@iainpare.ac.id*', Syaifullah@iainpare.ac.id*²,

*Corresponding Author

Received: April 18, 2025; Accepted: Mei 20, 2025; Published: Juli 10, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ekonomi Islam dalam perspektif pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo serta relevansinya terhadap pembangunan ekonomi rakyat di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif berbasis syariah, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan umat. Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya kesenjangan antara idealitas konsep ekonomi Islam dan realitas implementasinya yang masih terfokus pada sektor keuangan, sementara sektor riil dan ekonomi kerakyatan belum berkembang secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen. Data penelitian bersumber dari karya-karya utama Muhammad Dawam Rahardjo sebagai data primer, serta buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat pada sektor industri keuangan syariah, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi rakyat. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan permodalan, lemahnya kelembagaan, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya orientasi produk keuangan syariah terhadap maqashid syariah. Selain itu, ekonomi Islam masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya inklusi keuangan, dominasi modal asing, serta lemahnya kemandirian produksi umat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi Islam yang lebih inklusif, berorientasi pada sektor riil, dan berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Muhammad Dawam Rahardjo

Abstract

This study aims to analyze the concept of Islamic economics from the perspective of Muhammad Dawam Rahardjo's thought and its relevance to the development of the people's economy in Indonesia. The main focus of this study is to examine how Islamic economics is not only understood as a normative system based on sharia, but also as an instrument of social transformation oriented towards justice, independence, and the welfare of the people. This research begins with the problem of the gap between the idealism of the Islamic economic concept and the reality of its implementation, which is still focused on the financial sector, while the real sector and the people's economy have not developed optimally. The research method used is library research with a qualitative approach through document study. The research data are sourced from the main works of Muhammad Dawam Rahardjo as primary data, as well as books, scientific journals, and other relevant literature as secondary data. The research findings indicate that the development of Islamic economics in Indonesia has experienced rapid growth in the Islamic financial industry, but has not yet had a significant impact on strengthening the people's economy. The main obstacles identified include limited capital, weak institutions, low quality and quantity of human resources, and the suboptimal orientation of Islamic financial products towards the maqashid sharia. Furthermore, the Islamic economy still faces structural challenges in the form of low financial inclusion, the dominance of foreign capital, and weak independence in the production of the people. Practically, the results of this research are expected to serve as a reference for academics, practitioners, and policymakers in formulating strategies for developing an Islamic economy that is more inclusive, oriented towards the real sector, and supports sustainable empowerment of the people's economy.

Keywords: *Islamic Economics, Empowerment of the People's Economy, Muhammad Dawam Rahardjo*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan inklusif, yang mengajarkan nilai persamaan, keadilan, dan keseimbangan dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik ekologi, politik, ekonomi, maupun spiritual. Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, dipandang sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT. Manusia ditempatkan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang mekanisme produksi dan distribusi, tetapi juga menekankan nilai persatuan, kebersamaan, dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama. (Haris, 2023)

Ekonomi Islam dibangun di atas nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga ia merupakan bagian integral dari sistem kehidupan Islam secara keseluruhan. Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang ekonomi. (Sugiarto, 2025) Sebagai sistem kehidupan, Islam menyediakan seperangkat prinsip, norma, dan instrumen yang mengatur perilaku ekonomi manusia agar selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dengan demikian, ekonomi Islam hadir sebagai suatu sistem nilai yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual secara seimbang.

Namun, dalam realitasnya, penerapan ekonomi Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, masih menghadapi beragam persoalan. Meskipun konsep ekonomi Islam telah berkembang pesat secara teoretis dan institusional, kondisi ekonomi umat Islam secara umum masih menunjukkan ketertinggalan dan ketimpangan. (Ariby et al., 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas implementasi ekonomi Islam dalam menjawab problem kemiskinan, ketidakadilan distribusi, dan lemahnya kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan antara idealitas konsep dan realitas praktik inilah yang menjadi persoalan utama dalam pengembangan ekonomi Islam.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang ekonomi Islam sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan doktrinal, seperti pembahasan prinsip keadilan, larangan riba, zakat, dan sistem bagi hasil. (Sultan, 2025) Kajian semacam ini penting, namun cenderung belum menyentuh secara mendalam aspek struktural, sosial, dan politik yang memengaruhi keberhasilan ekonomi Islam dalam praktik. Selain itu, banyak penelitian yang belum mengaitkan pemikiran tokoh ekonomi Islam dengan konteks pembangunan ekonomi nasional, sehingga kontribusi pemikiran tersebut belum termanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, pemikiran M. Dawam Rahardjo menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dan kritis dalam memahami ekonomi Islam. Ia memandang ekonomi Islam tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai suatu proses transformasi sosial-ekonomi yang harus berpijak pada realitas umat. (Junaidi, 2019) Konsep tiga pilar ekonomi Islam—teori, sistem, dan aktivitas ekonomi umat—menjadi kerangka penting untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan praktik ekonomi yang nyata. Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus mengelaborasi pemikiran Dawam Rahardjo dalam konteks pembangunan ekonomi Islam di Indonesia masih relatif terbatas.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan, khususnya dalam upaya memahami relevansi pemikiran ekonomi Islam terhadap permasalahan pembangunan kontemporer. Belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana gagasan ekonomi Islam dapat dioperasionalkan secara konkret untuk memperkuat kelompok ekonomi lemah, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Padahal, tantangan pembangunan saat ini menuntut pendekatan ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan bermakna secara spiritual.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini

berupaya memperkaya diskursus ekonomi Islam melalui analisis pemikiran M. Dawam Rahardjo sebagai alternatif paradigma pembangunan ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, khususnya karya-karya M. Dawam Rahardjo yang berkaitan dengan konsep ekonomi Islam, serta buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung pembahasan penelitian. (Setyaningsih, 2023) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan memahami pemikiran, gagasan, dan konsep secara mendalam, bukan mengukur fenomena secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan pemikiran tokoh secara komprehensif dalam konteks sosial dan keilmuan. (Mallawa, 2016)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen (document study). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian teks dan dokumen tertulis, khususnya pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo mengenai ekonomi Islam. Melalui studi dokumen, peneliti menelaah ide, konsep, serta kerangka pemikiran yang tertuang dalam karya-karya tokoh tersebut secara sistematis dan kritis.

Jenis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan berupa dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Berdasarkan penggolongannya, data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer merupakan sumber utama penelitian yang diperoleh langsung dari karya-karya ilmiah M. Dawam Rahardjo, antara lain *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (1999), *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial* (2015), *Koperasi Sukses Indonesia* (2011), *Etika dan Manajemen dan Ekonomi* (1989), serta *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (1985).

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan konsep ekonomi Islam dan pemikiran M. Dawam Rahardjo, seperti buku teks, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta karya akademik lain yang membahas ekonomi Islam secara umum. Sementara itu, data tersier berupa bahan rujukan tambahan yang berfungsi membantu penafsiran data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi sejenisnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan tertulis. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh teori, pandangan, dan penjelasan terkait konsep ekonomi Islam. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, kitab, artikel ilmiah, makalah seminar, jurnal, serta media cetak lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Adapun metode pengolahan data dilakukan melalui analisis kualitatif dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah editing, yaitu memeriksa kembali seluruh data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian isi, serta relevansinya dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi, yakni pengelompokan data secara sistematis berdasarkan tema dan kebutuhan analisis agar memudahkan penafsiran. Tahap terakhir adalah penafsiran data, di mana peneliti menganalisis dan menarik kesimpulan dengan mengaitkan teori yang digunakan dengan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian secara logis dan ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama pada sektor industri keuangan syariah. Perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi motor utama pertumbuhan tersebut. Namun demikian, pertumbuhan ini masih bersifat sektoral dan belum menyentuh sektor riil secara luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi rakyat. Data menunjukkan bahwa meskipun tingkat pertumbuhan perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil. Hingga tahun 2012, aset perbankan syariah hanya mencapai sekitar 4,1% dari total aset perbankan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi ekonomi Islam terhadap perekonomian nasional belum signifikan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa salah satu kendala utama pengembangan ekonomi Islam adalah keterbatasan permodalan. Bank syariah masih bergantung pada sumber modal yang terbatas, sehingga berpotensi membuka peluang dominasi modal asing. Kondisi ini dapat mengurangi kemandirian ekonomi umat dalam jangka panjang. Dari sisi kelembagaan, ditemukan bahwa kapasitas institusi ekonomi Islam masih belum optimal. Produk-produk keuangan syariah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat dan sektor usaha kecil dan menengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah serius dalam pengembangan ekonomi Islam. Jumlah tenaga profesional yang memahami teori dan praktik ekonomi syariah masih terbatas, baik di lembaga keuangan maupun sektor pendidikan dan pelatihan. (Aflah et al., 2026) Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, ditemukan bahwa misi ekonomi Islam menurut M. Dawam Rahardjo mencakup tiga aspek utama, yaitu pengembangan ekonomi komersial, penerapan etika dan hukum syariah, serta penguatan kekuatan ekonomi umat Islam. Ketiga misi ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik ekonomi nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan Sarekat Dagang Islam Indonesia (SDII) merupakan upaya strategis untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan berbasis Islam. SDII berperan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis produk ekonomi umat masih terbatas dan belum mampu bersaing secara global. Banyak

produk kebutuhan umat Islam, seperti perlengkapan ibadah, justru diproduksi oleh negara non-Muslim, yang menunjukkan lemahnya kemandirian produksi umat. Dari sisi struktur ekonomi rakyat, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha masih bergerak di sektor pertanian. Sementara itu, keterlibatan ekonomi umat di sektor non-pertanian, seperti industri dan perdagangan modern, masih relatif rendah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi rakyat, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang menghambat optimalisasi perannya dalam perekonomian nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam belum sejalan dengan peningkatan kontribusinya terhadap ekonomi rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Dawam Rahardjo yang menilai bahwa ekonomi Islam di Indonesia masih terjebak pada sektor keuangan dan belum terintegrasi secara kuat dengan sektor riil.

Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah meskipun tingkat pertumbuhannya tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan institusional dan dampak ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan seharusnya tidak hanya diukur dari aset, tetapi juga dari kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat luas. Keterbatasan permodalan menjadi tantangan serius karena bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi umat. Ketergantungan pada modal asing berpotensi menggeser orientasi perbankan syariah dari pemberdayaan ekonomi rakyat menuju kepentingan komersial semata.

Dari sisi kelembagaan, produk keuangan syariah yang belum sepenuhnya mencerminkan maqashid syariah menunjukkan perlunya reformulasi desain produk. Perbankan syariah seharusnya lebih berorientasi pada pembiayaan sektor produktif, seperti UMKM dan ekonomi kerakyatan. Permasalahan sumber daya manusia mencerminkan lemahnya sinergi antara dunia akademik dan praktik ekonomi syariah. Pendidikan ekonomi Islam masih cenderung teoritis, sementara pelaku praktik sering kali kurang memiliki landasan keilmuan yang kuat. Tiga misi pemberdayaan ekonomi umat yang dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada moralitas dan keberlanjutan dakwah Islam. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi Islam harus diukur secara multidimensional.

Keberadaan SDII sebagai gerakan ekonomi kerakyatan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat membutuhkan pendekatan kelembagaan berbasis komunitas. SDII menjadi simbol kebangkitan ekonomi umat yang berakar pada sejarah perjuangan ekonomi Islam di Indonesia. Ketergantungan umat Islam pada produk halal dari luar negeri menunjukkan lemahnya strategi produksi nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemandirian produksi merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat dan ketahanan ekonomi nasional.

Dominasi sektor pertanian dalam ekonomi rakyat menunjukkan perlunya diversifikasi usaha umat. Penguatan sektor perdagangan, industri kreatif, dan jasa berbasis syariah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi umat. Dengan

demikian, pengembangan ekonomi Islam dalam konteks ekonomi kerakyatan membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup penguatan permodalan, reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi nilai-nilai etika dan syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan M. Dawam Rahardjo tentang ekonomi Islam sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Tantangan yang sangat besar ini menuntut strategi yang efektif dalam pengembangan permodalan dan peningkatan kapasitas yang didukung oleh pengelola yang profesional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi permodalan, karena keterbatasan sumber permodalan dalam negeri, maka bank syariah ke depan menghadapi risiko dimana sumber permodalan akan dikuasai oleh pihak asing. Dari sisi pengembangan kapasitas kelembagaan, ekonomi Islam menghadapi permasalahan terkait dengan kesesuaian produk industri keuangan syariah yang khas dengan nuansa tujuan syariahnya dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang lembaga apa yang paling cocok dan akomodatif terhadap sistem syariah.

Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, masalah utamanya adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Situasi ini umumnya diatasi dengan berdirinya industri pendidikan dan pelatihan profesional. Namun, pelatihan semacam itu seringkali terkendala oleh dua hal. Pertama, keterbatasan ekonomi Islam dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kurangnya tenaga pengajar dan pelatih yang profesional, berpengalaman, dan berkualitas dalam praktik. Pada kenyataannya, mereka yang melakkan praktik umumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, peran strategis ekonomi Islam dalam perekonomian nasional masih menjadi pertanyaan. Peran strategis ekonomi Islam sebenarnya sangat ditentukan oleh strategi pembangunan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, saat menjabat sebagai ketua KADIN, Aburizal Bakrie pernah menyampaikan bahwa permasalahan ekonomi nasional yang paling mendasar dapat diselesaikan dengan mengembangkan usaha kecil dan mikro (UKM) atau ekonomi kerakyatan yang mencakup 99% dari seluruh perekonomian nasional. Artinya, peran strategis ekonomi Islam harus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Dilihat dari pengembangan kapasitas kelembagaannya, ekonomi Islam menghadapi tantangan yang terkait dengan kesesuaian produk industri keuangan syariahnya, lalu terkait juga dengan pengembangan sumber daya manusianya. Dengan adanya fenomena tersebut membuat peran strategis ekonomi Islam dalam perekonomian nasional dipertanyakan, padahal peran ekonomi Islam sangat ditentukan oleh pembangunan ekonomi nasional tersebut. Seperti yang dikatakan Aburizal Bakrie pada saat menjabat menjadi ketua KADIN, pembangunan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan pengembangan usaha kecil dan mikro (UKM). Jika sektor tersebut diberdayakan, strategi pengembangan ekonomi Islam perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat

Berdasarkan strategi inklusi finansial. Namun perbankan Indonesia pada umumnya masih harus meningkatkan orientasi financial inclusion agar bisa menjangkau UKM atau

meningkatkan akses ekonomi rakyat terhadap fasilitas finansial, yang juga berarti meningkatkan partisipasi ekonomi rakyat dalam kegiatan ekonomi. Kendala utama financial inclusion adalah rendahnya tingkat pendapatan sehingga masyarakat tidak mampu menabung. Selain itu, hal ini juga disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perbankan dan lembaga keuangan secara umum. Kendala utama akses fasilitas perbankan adalah faktor timbal balik antara ketidakmampuan UKM dan masyarakat miskin produktif untuk memenuhi persyaratan perbankan di satu sisi dan peraturan administrasi perbankan yang terlalu berat untuk dipenuhi oleh UKM dan masyarakat miskin produktif di sisi lain. Untuk meningkatkan partisipasi UMKM dan masyarakat miskin produktif dalam perbankan syariah, perlu adanya lembaga intermediasi yang menjembatani masyarakat dan lembaga perbankan yaitu koperasi. Artinya, bangunan usaha yang paling tepat untuk mengembangkan UKM adalah koperasi syariah atau BMT syariah yang merupakan badan hukum koperasi. Perbankan Indonesia secara umum masih perlu meningkatkan fokus pada inklusi keuangan untuk menjangkau UKM atau dalam meningkatkan akses ekonomi masyarakat terhadap fasilitas keuangan. Namun peraturan perbankan terlalu memberatkan bagi usaha kecil dan menengah dan masyarakat miskin yang tidak produktif

Menurut Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi rakyat memiliki tiga misi. Pertama, tugas mengembangkan ekonomi komersial menurut ukuran ekonomi dan perdagangan umum, seperti jumlah produksi, lapangan kerja, keuntungan, tabungan, investasi, impor dan ekspor, dan kelangsungan ekonomi bisnis (Nurhidayat et al., 2024) Kedua, praktik moralitas dan perumusan hukum syariah harus menjadi ciri aktivitas ekonomi Muslim. Dan ketiga, memperkuat kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat disalurkan melalui zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk memenuhi misi utamanya, "perusahaan komersial" harus mampu menjawab pertanyaan siapa, apa, bagaimana, dan untuk siapa? Tampaknya mudah untuk menjawab pertanyaan apa pun karena jawabannya tentu saja Muslim sebagai agen ekonomi dan komersial. Masalah muncul ketika harus menjawab siapa yang dimaksud menjadi "Muslim" di sini, apakah itu Muslim secara umum atau lebih khusus kelompok Santri.

Kedua arah dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Tentu saja, pertanyaan tentang apa, terutama apa yang harus diproduksi umat Islam tergantung pada permintaan pasar. (Aisyah et al., 2025) Namun, "nilai budaya" dapat mempengaruhi jenis produk, baik barang maupun jasa yang dianggap memenuhi kriteria khalalan thoyyiban, yaitu barang dan jasa menurut hukum Islam yang memenuhi beberapa persyaratan kualitas minimum atau maksimum. Pentingnya produk khusus, seperti pakaian dan perlengkapan keagamaan yang saat ini diproduksi oleh non-Muslim di negara-negara yang berpotensi anti-Muslim, seperti sajadah yang dibuat di Rumania dan Cina atau sajadah yang diproduksi di penjara-penjara di India. Bagaimana produksi, perdagangan dan konsumsi barang-barang tersebut tergantung pada dua faktor utama, yaitu kualitas sumber daya manusia dan tingkat perkembangan dan manajemen teknologi di Indonesia pada umumnya. Pertanyaan itu setidaknya menyangkut dua aspek. Pertama, apa kerangka prioritas untuk barang dan jasa yang dihasilkan. Kedua,

siapa yang akan diuntungkan dari pembangunan. Aspek pertama menyangkut distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai kelas masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan ekonomi rakyat terdapat tiga tugas, yaitu; Pertama, tugas pembangunan ekonomi dan perdagangan; Kedua, pelaksanaan etika dan penetapan hukum syariah; Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam. Dalam pencapaian misi tersebut, proyek bisnis muslim harus mampu menjawab pertanyaan, siapa, apa, bagaimana, dan untuk siapa. Kedua, aspek etika dan syariah merupakan ciri dari masalah ekonomi dan komersial dari sudut pandang Islam. Umat Islam harus menjalankan bisnisnya atas dasar etika bisnis, seperti tidak menimbun ketika orang kehabisan stok untuk mendapatkan keuntungan, menyuap dealer untuk mendapatkan pesanan, atau menipu konsumen dengan barang yang tidak seperti yang diiklankan. Meskipun tampaknya tidak ada etika bisnis saat ini, sudah menjadi kewajiban bagi para profesional untuk membentuk etika bisnis modern.

Untuk mempertajam pemahaman, kita dapat membuat beberapa pembagian dalam bidang usaha. Pertama, yang dapat dibedakan antara sektor formal dan informal, yang kedua antara yang bergerak di bidang pertanian dan non pertanian. Dan ketiga ada perbedaan antara pengusaha dan pekerja dan diantara kedua definisi tersebut terdapat pekerja mandiri yang bukan pekerja non pertanian, juga pengusaha atau sekaligus termasuk pekerja dan pengusaha. Mungkin usaha kecil dijalankan dalam sistem pabrik dan non pabrik atau di rumah tangga. Kelompok pengusaha kecil juga dapat dibagi menjadi tiga.

Pertama pengusaha kecil tanpa menggunakan tenaga kerja yang membantu. Jumlah 14,4 juta atau mencapai 43,2%. Kedua, pengusaha kecil yang dibantu oleh pekerja tidak tetap tersebut sebagian besar adalah anggota rumah tangga sendiri sebanyak 18,0 juta atau 53,7%. Dan ketiga, pengusaha kecil yang dibantu buruh tetap adalah 1,0 juta orang atau 3,1%. Kategori ketiga inilah yang bisa disebut wirausahawan sejati, yaitu mereka yang memiliki dan mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen.

Pengusaha yang sebenarnya adalah seseorang yang memperoleh penghasilannya dari keuntungan perusahaan. Sementara itu, banyak pengusaha Indonesia yang pendapatannya adalah upah yang mereka bayar dan terima, seperti pada sebagian besar subsistem petani, pekerja mandiri atau pengrajin kecil. (Hidayati, 2019) Dalam bidang usaha terdapat tiga bagian, yaitu; Pertama, yang dapat dibedakan antara sektor formal dan informal; Kedua, pertanian dan non pertanian; Ketiga, antara pengusaha dan pekerja. Kelompok pengusaha kecil juga dibagi menjadi tiga, yaitu; Pertama, pengusaha kecil tanpa menggunakan tenaga kerja yang membantu; Kedua, dibantu oleh pekerja tetap;

Ketiga, dibantu buruh tetap. Sebagian besar pelaku ekonomi umat bergerak di sektor pertanian yang umumnya menghasilkan padi dan palawija. Sektor pertanian dalam PJP I hampir identik dengan pertanian pangan, karena pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai swasembada pangan yang dicapai pada tahun . Namun sebenarnya kegiatan di bidang pertanian mencakup bidang yang sangat luas. Dengan melihat sektor unggulan, kegiatan ini meliputi pertanian hortikultura (sayuran, bunga dan buah), peternakan unggas dan ruminansia, perikanan darat (ikan mas, gurame, lele, belut, dll) budidaya (bandeng, udang, kepiting, dll) dan perikanan laut dan perkebunan (tanaman tahunan dan musiman).

Setiap sektor memiliki potensi untuk menjadi kawasan usaha kecil yang menguntungkan. Namun, sektor pertanian ini mengandung beberapa karakteristik

kelemahan. Yang pertama adalah luas lahan rata-rata yang sangat sempit. Luas lahan yang sempit ini menyulitkan petani untuk menggunakan input yang mahal. Kelemahan lainnya adalah kecilnya modal finansial yang dimiliki petani. Akibatnya, mereka selalu jatuh ke praktik perbudakan yang sangat mengurangi keuntungan. Praktik bonding ini menghambat fungsi KUD, karena bonding selalu didahulukan oleh petani. Teknologi sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, mengingat ketersediaan penyuluh pertanian dan sentra pertanian. Namun, pertanian kita belum banyak memanfaatkan penemuan-penemuan teknologi, seperti biotek yang selama ini di praktikkan di Thailand.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif yang berisi larangan dan anjuran syariah, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Ekonomi Islam harus diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat, bukan semata-mata pada pertumbuhan sektor keuangan syariah. Ketimpangan antara idealitas konsep dan realitas praktik ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama ekonomi Islam di Indonesia terletak pada orientasi pengembangannya yang masih terfokus pada industri keuangan syariah, sementara sektor riil dan ekonomi kerakyatan belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah, keterbatasan permodalan, serta dominasi modal asing menjadi indikator bahwa ekonomi Islam belum berfungsi optimal sebagai sarana pemberdayaan umat. Kondisi ini memperkuat kritik Dawam Rahardjo bahwa ekonomi Islam cenderung terjebak pada simbol dan institusi formal, tanpa transformasi nyata dalam struktur ekonomi masyarakat bawah.

Selain itu, kelemahan kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala serius dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam. Produk-produk keuangan syariah yang belum sepenuhnya mencerminkan maqashid syariah menunjukkan adanya jarak antara nilai normatif dan praktik operasional. Pendidikan dan pelatihan ekonomi Islam yang masih bersifat teoritis juga menyebabkan lemahnya integrasi antara dunia akademik dan praktik ekonomi. Akibatnya, ekonomi Islam belum mampu membentuk ekosistem yang kuat untuk mendukung usaha kecil, mikro, dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Dalam perspektif Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi rakyat harus dijalankan melalui tiga misi utama, yaitu pengembangan ekonomi komersial, penerapan etika dan hukum syariah, serta penguatan kekuatan ekonomi umat Islam. Ketiga misi ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan

keuntungan, tetapi dari sejauh mana ekonomi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, serta menjadi sumber pendukung dakwah dan kesejahteraan sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga misi tersebut belum terintegrasi secara utuh dalam kebijakan dan praktik ekonomi Islam di Indonesia.

Peran koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dipandang sebagai solusi strategis untuk menjembatani keterbatasan akses ekonomi rakyat terhadap lembaga perbankan. Hambatan administratif perbankan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat menyebabkan inklusi keuangan syariah belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan lembaga keuangan berbasis komunitas menjadi langkah penting dalam membangun ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Dawam Rahardjo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi besar sebagai paradigma alternatif pembangunan, namun membutuhkan reorientasi strategi yang lebih substantif. Pengembangan ekonomi Islam harus diarahkan pada penguatan sektor riil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi kelembagaan, serta integrasi nilai etika dan syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi. Tanpa langkah tersebut, ekonomi Islam berisiko hanya menjadi label normatif tanpa dampak signifikan terhadap kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan relevansi pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo sebagai landasan konseptual dalam merumuskan pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada para akademisi dan peneliti terdahulu yang karyanya menjadi rujukan penting dalam memperkaya kajian pemikiran ekonomi Islam, khususnya perspektif Muhammad Dawam Rahardjo. Apresiasi juga disampaikan kepada institusi akademik yang telah menyediakan akses terhadap sumber literatur ilmiah, serta kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan, kritik, dan dukungan selama proses penulisan. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan wacana ekonomi Islam dan pembangunan ekonomi rakyat di Indonesia..

Daftar Pustaka

- Aflah, (2026). *Pembiayaan Bank Syariah*. 4(1), 738–754.
- Agustin, (2025). *Konsep Dasar Ekonomi Islam Dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern*. 2(1), 490–501.
- Aisyah, (2025). Pemetaan Profil Sosial Ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus di 12 Kecamatan, Kabupaten Batubara). *Sajjana: Public Administration Review*, 3(01), 155–166.
- Ariby, (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia*.
- Haris, (2023). Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan. *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 02(04), 1–9.

- Hifayati, S. (2019). *Teori ekonomi mikro* (S. Anwar (ed.); 1st ed., Issue 1). Unpam Press.
- Junaidi, H. (2019). Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial Menurut Muhammad Dawam Rahardjo. *Jurnal Muamalah*, 2(1).
- Mallawa, (2016). *Pengaruh Penggunaan Chatgpt Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas Xi Sma Negeri 6 Takalar*. 1–23.
- Muslimin, (2022). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi : Pandangan Dasar , Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 136–161.
- Nur, (2017). terhadapnya tidak boleh dibatasi hanya kepada pengertian formal dan tersempurna ini sangat besar peranannya bagi manusia , Tidak hanya Luasnya kiprah Islam humanis dalam membangun peradaban manusia ke ara. *Jurnal Univeristas Ulama Surakarta*, 37(1), 1–26.
- Nurhidayat,. *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia. 1*, 33–40.
- Setyaningsih, E. (2023). Perkembangan Multimedia Digital dan Pembelajaran. *Indonesian Journal of Learning and Instructional Innovation*, 1(01), 34–48.
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. Fauzian (ed.); 1st ed.). Intaka Pustaka Publisher.
- Sultan, (2025). Mizanuna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).